



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : PM 78 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan, pengelolaan dan penemuan kembali arsip secara tepat dan benar diperlukan suatu pengaturan secara terarah, terencana, tepat guna dan tepat sasaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

### **Pasal 1**

Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan adalah kode pemisahan atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada serta pengelompokan arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan memberikan kode pengenal sesuai dengan masalah yang terkandung di dalamnya.

### **Pasal 2**

Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyimpanan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, dengan cara memberikan kode klasifikasi dalam bentuk penomoran pada setiap naskah dinas yang masuk atau ke luar dari lingkungan Kementerian Perhubungan.

### **Pasal 3**

Susunan Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan mengikuti sifat per persoalan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan yaitu :

- a. Klasifikasi Fasilitatif, dan
- b. Klasifikasi Substantif;

### **Pasal 4**

- (1) Klasifikasi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah klasifikasi yang berkaitan dengan tugas penunjang.
- (2) Klasifikasi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok.

### **Pasal 5**

Unsur yang terdapat pada kode klasifikasi arsip baik klasifikasi fasilitatif maupun klasifikasi substantif terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Induk masalah;
- b. Pokok persoalan;
- c. Anak persoalan.

## Pasal 6

- (1) Induk masalah yang terdapat pada klasifikasi fasilitatif meliputi masalah Perencanaan (PR), Kepegawaian (KP), Keuangan (KU), Perlengkapan (PL), Penanaman Modal (PM), Hukum (HK), Umum (UM), Komunikasi Publik (HM), Hubungan Antar Lembaga (HL), Kerjasama Luar Negeri (KL), Pengawasan (PS), Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penelitian dan Pengembangan (LT), Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Perhubungan (KK), Data dan Informasi (DI).
- (2) Induk masalah yang terdapat pada klasifikasi substantif meliputi masalah Angkutan Jalan (AJ), Perkeretaapian (KA), Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (AP), Angkutan Laut (AL), Angkutan Udara (AU), Mahkamah Pelayaran (MP).

## Pasal 7

- (1) Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan menggunakan gabungan kode huruf dan angka.
- (2) Induk masalah diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan atau kependekan penyebutan induk masalah.
- (3) Pokok persoalan diberi kode angka secara berurutan dari 00, 10, 20, 30, dan seterusnya.
- (4) Anak persoalan diberi kode angka secara berurutan dari 1, 2, 3, dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka didepannya sesuai dengan kode pokok persoalannya.

## Pasal 8

Untuk pemberian kode klasifikasi atau penomoran pada setiap naskah dinas kode huruf untuk pengenal induk masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode, sedangkan kode angka untuk pokok persoalan dan anak persoalan ditempatkan pada bagian kedua dan ketiga dari susunan kode.

## Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan unit organisasi menghadapi pokok persoalan atau anak persoalan yang belum tertampung dalam klasifikasi arsip yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dapat menambah pokok persoalan atau anak persoalan dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap pokok persoalan dan anak persoalan yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## Pasal 10

Rincian lengkap kode klasifikasi arsip Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

## Pasal 11

Penyelenggaraan kearsipan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan klasifikasi arsip yang ditentukan dalam Peraturan ini, serta dapat merinci lebih lanjut terhadap kode klasifikasi arsip sesuai keperluan unit organisasinya.

## Pasal 12

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2006 tentang Kode Klasifikasi Arsip dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

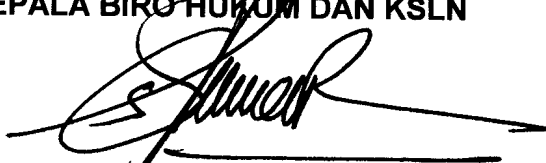
ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Ketua Mahkamah Pelayaran;
6. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
7. Para Kepala UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Atase Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

## **TABEL KLASIFIKASI ARSIP**

### **1. KLASIFIKASI FASILITATIF**

#### **PR PERENCANAAN**

##### 00 Penyusunan Rencana dan Program

- 001 Transportasi Darat
- 002 Transportasi Laut
- 003 Transportasi Udara
- 004 Transportasi Perkeretaapian
- 005 Transportasi Multimoda
- 006 Badan – Badan, Pusat-Pusat
- 007 Umum

##### 10 Pengendalian

- 101 Transportasi Darat
- 102 Transportasi Laut
- 103 Transportasi Udara
- 104 Transportasi Perkeretaapian
- 105 Transportasi Multimoda
- 106 Badan – Badan, Pusat-Pusat
- 107 Umum

##### 20 Analisis

- 201 Transportasi Darat
- 202 Transportasi Laut
- 203 Transportasi Udara
- 204 Transportasi Perkeretaapian
- 205 Transportasi Multimoda
- 206 Badan – Badan, Pusat-Pusat
- 207 Umum

##### 30 Tarif

- 301 Transportasi Darat
- 302 Transportasi Laut
- 303 Transportasi Udara
- 304 Transportasi Perkeretaapian
- 305 Transportasi Multimoda
- 306 Umum

## **KP KEPEGAWAIAN**

### 00 Tata Usaha Kepegawaian

- 001 Data Perorangan/Status/Database/Sensus/Statistik/DRH
- 002 NIP/Kartu Pegawai/Kartu PPNS/Kartu Pengenal
- 003 Daftar Nominatif/Data Tenaga Honorer
- 004 Penugasan/Penunjukan/Surat Perintah/Pemanggilan/Lakhar/Surat Pernyataan/Surat Keterangan/SPMT
- 005 Penghargaan/Piala/Piagam/Tanda Kehormatan
- 006 Pendelegasian Wewenang
- 007 Sumpah Pegawai/Penghentian Pegawai
- 008 Spesimen Tanda Tangan
- 009 Daftar Kepangkatan/DUK
- 010 Paspor/Exit Permit/Fiskal/Izin ke Luar Negeri
- 011 Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- 012 Cuti
- 013 Nikah/Perceraian/Rujuk/Izin Perkawinan
- 014 Surat Kuasa
- 015 Absensi
- 016 Izin Kerja/Izin Belajar/Izin Berlayar/Izin Jalan/Izin di Dalam Negeri

### 10 Perencanaan Kepegawaian

- 101 Formasi Pegawai
- 102 Lamaran/Penyaringan/Pengujian Kesehatan/Magang
- 103 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 104 Penempatan/Bantuan Pegawai
- 105 Pengendalian Kepangkatan/Jabatan Fungsional/Struktural
- 106 Dispensasi Jabatan
- 107 Pendayagunaan/Pembinaan SDM
- 108 Tenaga Kerja/Tenaga Ahli/Strata/PPNS/Penguji
- 109 Penilaian Jabatan/Analisis Kepegawaian
- 110 Evaluasi Kepegawaian
- 111 Pembibitan sarjana/lkatan dinas

### 20 Penggajian Pegawai

- 201 Penggajian/KGB/Tunjangan Jabatan/Daftar Gaji/Biaya Pemindahan
- 202 Pendaftaran/Keluarga/Perkawinan/Anak/Karis/Karsu
- 203 Daftar Uang Makan/Uang Lembur/Honorarium

### 30 Tata Mutasi

- 301 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 302 Kenaikan Pangkat/Kenaikan Jabatan
- 303 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan PPNS/SPMJ
- 304 Pemindahan/Mutasi/Lolos Butuh
- 305 Peninjauan Masa Jabatan/Masa Kerja
- 306 Pembantuan/Penarikan Kembali
- 307 Impasing/Penyesuaian Ijazah
- 308 Pemanggilan Pejabat
- 309 Serah Terima Jabatan/Tugas

- 310 *Assesment* Pegawai
- 311 Peta Pemangku Jabatan

#### 40 Penilaian

- 401 Ujian Dinas
- 402 Teguran/Peringatan/Penundaan Gaji dan Pangkat/Penurunan Pangkat
- 403 Skorsing/Hukuman Jabatan
- 404 Rehabilitasi/Permohonan Kerja Kembali
- 405 ijazah
- 406 Jam Kerja/Disiplin
- 407 DP3
- 408 Angka Kredit Jabatan Fungsional

#### 50 Kesejahteraan Pegawai

- 501 Kesehatan/Donor Darah
- 502 Asuransi/Taspen/Askes/Bapetarum
- 503 Bantuan Pegawai/Dana Pegawai/Uang Duka
- 504 Olah Raga/Kesenian/Lomba/Gathering
- 505 Pembinaan Mental, Dewan dakwah, Ideologi, Mental Kejuangan
- 506 Orang Tua Asuh
- 507 Pelayanan Psikologi/Kunjungan Keluarga/Pembinaan Jasmani (*Indoor and Outdoor training/Outbond*)
- 508 Psikogram

#### 60 Pemberhentian dan Pensiun

- 601 Pemberhentian Dengan Hormat/Mengundurkan Diri
- 602 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
- 603 Masa Persiapan Pensiun (MPP)/Pembekalan Pensiun
- 604 Penetapan uang Tunggu/Uang Muka Pensiun/Uang Pesangon
- 605 Pensiun
- 606 Pensiun Janda/Duda/Anak
- 607 Pensiun Meninggal Dunia/Tewas
- 608 Nominatif Pensiun

#### 70 Perkumpulan Pegawai/non Kementerian

- 701 KORPRI/Serikat Pekerja/Organisasi Fungsional/Perkumpulan Pensiun Pegawai
- 702 Kewanitaan/Dharma wanita
- 703 Koperasi, Kantin, Wisma Peristirahatan
- 704 Forum Komunikasi (Forkom) Transportasi/Pramuka
- 705 Ormas/Parpol

#### 80 Organisasi dan Tata Laksana

- 801 Organisasi (Evaluasi, Rencana, Penetapan Struktur)/TIM
- 802 Tata Laksana (Evaluasi, Rencana, Penetapan)
- 803 Pembakuan Sarana Kerja (Evaluasi, Rencana, Penetapan Sarana Kerja)
- 804 Reformasi Birokrasi
- 805 Peta Jabatan

## **KU KEUANGAN**

### 00 Anggaran

- 001 RAPBN/APBN (Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Anggaran, RKA Kementerian)
- 002 DIPA (Rincian RKA-KL, Konsep DIPA, Petunjuk Operasional (PO), Pergeseran/Perubahan/Revisi DIPA dan PO DIPA, APBN-P/ABT)
- 003 Berita Acara, Kontrak/SPK
- 004 SPPD
- 005 SPP (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja lain-lain)
- 006 SPM (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja lain-lain)
- 007 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- 008 Laporan (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan) Realisasi Keuangan dan Fisik
- 009 Neraca (Semesteran, Tahunan)
- 010 Uang Lembur

### 10 Anggaran dan Pinjaman Luar Negeri

- 101 *Loan Agreement*/Hibah Luar Negeri
- 102 Ikhtisar Kegiatan
- 103 Kerangka Acuan Kerja
- 104 Studi Kelayakan
- 105 Rincian Anggaran Biaya
- 106 Dokumen Kontrak
- 107 *Reimbursement* kepada Negara/Badan Pemberian Bantuan
- 108 SPP/SPM
- 109 Pembukaan LC (*Letter of Credit*)/Valuta Asing/Penerbitan/Obligasi

### 20 Pendapatan/Penerimaan

- 201 Pajak-Pajak
- 202 Pendapatan Bukan Pajak (Transfer, Kas)
- 203 Sewa Pemanfaatan Aset/Barang Milik Negara

### 30 Perbendaharaan/Pembukuan/Verifikasi

- 301 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
- 302 Tata Usaha Keuangan Negara
- 303 Pengelola Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima)
- 304 Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 305 Auditing
- 306 Likuidasi
- 307 Tagihan Dinas
- 308 Privatisasi



## **PL PERLENGKAPAN**

### 00 Analisis

- 001 Analisis Data
- 002 Klasifikasi Data
- 003 Rencana Kebutuhan

### 10 Pengadaan

- 101 Rekanan/Penawaran/Proposal/Brosur
- 102 Tender dan Kontrak/Prakualifikasi dan Pasca Kualifikasi, Penunjukan Pemenang, Sanggahan/Surat Kuasa Kontrak
- 103 Harga dan Mutu
- 104 Pembelian

### 20 Pembinaan/Pemeliharaan

- 201 Pembinaan/Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN)
- 202 Distribusi/Pengiriman
- 203 Pemeliharaan/Pemeriksaan
- 204 Rehabilitasi/Pemulihan
- 205 Pergudangan

### 30 Inventarisasi

- 301 Inventarisasi Umum/Mutasi Barang/Serah Terima Aset/Berita Acara Hibah
- 302 Barang-barang bergerak
- 303 Barang-barang tidak bergerak
- 304 Standardisasi/Kodefikasi

### 40 Penghapusan

- 401 Standardisasi/Petunjuk Teknis Penghapusan
- 402 Usul Penghapusan dan Data Dukung
- 403 Penilaian
- 404 Penetapan Penghapusan
- 405 Pelelangan/Penjualan
- 406 Tukar Guling/Ruislag

## **PM PENANAMAN MODAL**

### 00 Penanaman Modal Dalam Negeri

- 001 Transportasi Darat
- 002 Transportasi Laut
- 003 Transportasi Udara
- 004 Transportasi Perkeretaapian
- 005 Umum

### 10 Penanaman Modal Asing

- 101 Transportasi Darat
- 102 Transportasi Laut
- 103 Transportasi Udara
- 104 Transportasi Perkeretaapian
- 105 Umum

- 20 Penanaman Modal Patungan
  - 201 Transportasi Darat
  - 202 Transportasi Laut
  - 203 Transportasi Udara
  - 204 Transportasi Perkeretaapian
  - 205 Umum

- 30 Analisis dan Pengembangan
  - 301 Pengumpulan Data
  - 302 Analisis dan evaluasi
  - 303 Laporan

## **HK HUKUM**

- 00 Produk Lembaga Negara
  - 001 Undang – Undang Dasar
  - 002 Ketetapan MPR
  - 003 Undang-Undang
  - 004 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - 005 Peraturan Pemerintah
  - 006 Peraturan Presiden
  - 007 Keputusan Presiden/Peraturan Presiden
  - 008 Instruksi Presiden
  - 009 Peraturan Daerah
  - 010 Peraturan Lainnya
- 10 Produk Kementerian dan Non kementerian di Luar Kementerian Perhubungan
  - 101 Peraturan Menteri
  - 102 Keputusan Menteri
  - 103 Instruksi Menteri
  - 104 Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal
  - 105 Keputusan/Peraturan Gubernur, PERDA, KPU
  - 106 Surat Edaran
  - 107 Keputusan/Peraturan Lembaga/Badan
- 20 Produk Kementerian Perhubungan
  - 201 Kesepakatan Bersama (MOU)
  - 202 Peraturan Menteri
  - 203 Keputusan Menteri
  - 204 Instruksi Menteri
  - 205 Keputusan Sekretaris Jenderal
  - 206 Keputusan Inspektur Jenderal
  - 207 Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal
  - 208 Keputusan Kepala Badan
  - 209 Surat Edaran
  - 210 Putusan Mahkamah Pelayaran

- 30 Perdata
  - 301 Tentang Orang/Pengaduan/Somasi/Sengketa/Perlindungan Hukum
  - 302 Tentang Kebendaan
  - 303 Tentang Perikatan
  - 304 Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa
  
- 40 Pidana
  - 401 Kejahatan
  - 402 Pelanggaran/Peringatan/Teguran/Pencabutan
  - 403 KKN
  
- 50 PTUN
  - 501 Gugatan
  - 502 Putusan
  
- 60 Perizinan
  - 601 Pemberian/Persetujuan/Kewenangan/Rekomendasi
  - 602 Penolakan
  - 603 Peringatan
  - 604 Pencabutan
  - 605 Perpanjangan Izin
  - 606 Dispensasi

## **UM UMUM**

- 00 Ketatausahaan
  - 001 Kearsipan
  - 002 Surat Menyurat
  - 003 Sistem Tata Naskah
  - 004 Pengiriman/Alamat/Stempel/Kode Pos
  - 005 Risalah dan Reproduksi Rapim/Rapat Staf/Rakor/Sikab
  - 006 Laporan Bulanan Presiden
  - 007 Laporan dan Informasi
  - 008 Pelayanan Prima/Publik
  
- 10 Kerumahtanggaan
  - 101 Ketertiban dan Keamanan/Pungutan Liar
  - 102 Izin peminjaman (Alat-alat, Ruangan, Lapangan, dan lain-lain)
  - 103 Perjalanan Dinas
  - 104 Perumahan Dinas/Kendaraan Dinas
  - 105 *Cleaning Service*
  - 106 Gedung/Perkantoran/Gudang
  - 107 Pakaian Dinas/Tanda Pengenal
  - 108 Listrik/PAM/Telepon
  
- 20 Keprotokolan
  - 201 *Appointment*, Audiensi, Menghadap
  - 202 Kunjungan, Undangan

- 203 Pelantikan, Pengukuhan
- 204 Upacara
- 205 Peresmian
- 206 Rapat Kerja/Dinas/Forkom/Seminar/Temu Karya/Lokakarya
- 207 Ucapan (Terima kasih, Belasungkawa, Selamat)
- 208 Saran/Tanggapan/Jawaban/Pembicara/Presentasi/Wawancara/  
Pengarahan/ Kuisisioner/Paparan/Penyuluhan

30 Bantuan Dinas

- 301 Bencana Alam/Musibah
- 302 Angkutan
- 303 Sumbangan/Bantuan

**HM KOMUNIKASI PUBLIK**

00 Publikasi dan Dokumentasi

- 001 Rekaman, Film, Slide dan Foto
- 002 Pameran
- 003 Penerbitan Majalah/Buletin/Brosur
- 004 Sayembara, Penulisan, Festival, Spanduk dan Iklan
- 005 Pidato/Sambutan
- 006 Bibliotik/Bahan Pustaka, Peta, Pelayanan Keanggotaan, Laporan  
Pustaka
- 007 Sosialisasi
- 008 Pelayanan Informasi

10 Media Massa dan Opini Publik

- 101 Siaran Berita/Siaran Pers/Jumpa Pers
- 102 Kunjungan wartawan/Peliputan
- 103 Surat Kabar/Guntingan Berita/Analisis Berita
- 104 Radio, Televisi, dan Internet/Media Online

**HL HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

00 Lembaga Negara

- 001 MPR
- 002 DPR
- 003 DPD
- 004 Umum

10 Lembaga Pemerintah

- 101 Kepresidenan
- 102 Wakil Kepresidenan
- 103 Menko
- 104 Umum

## 20 Asosiasi

- 201 Asosiasi Bidang Darat
- 202 Asosiasi Bidang Laut
- 203 Asosiasi Bidang Udara
- 204 Asosiasi Bidang Kereta Api
- 205 Asosiasi Umum
- 206 Komisi

## **KL KERJASAMA LUAR NEGERI**

### 00 Kerjasama Bilateral

- 001 Transportasi Darat
- 002 Transportasi Laut
- 003 Transportasi Udara
- 004 Transportasi Perkeretaapian
- 005 Umum

### 10 Kerjasama Multilateral

- 101 ICAO
- 102 IMO
- 103 WTO/GATS
- 104 ESCAP
- 105 WMO
- 106 UNDP
- 107 OKI
- 108 *United Nations Commissions of Trade and Development (UNCTAD)*
- 109 COPASSARSAT
- 110 Gerakan Negara Non Blok (GNB)
- 111 Umum

### 20 Kerjasama Regional

- 201 APEC
- 202 ASEAN
- 203 IMT-GT
- 204 IMS-GT
- 205 BIMP-EAGA
- 206 Umum

### 30 Kerjasama Dengan Badan Internasional Lain

- 301 Kerjasama PBB di Bidang Transportasi
- 302 Kerjasama Non PBB di Bidang Transportasi
- 303 Umum

## **PS PENGAWASAN**

### 00 Kinerja

- 001 Sekretariat Jenderal
- 002 Inspektorat Jenderal
- 003 Ditjen Perhubungan Darat
- 004 Ditjen Perhubungan Laut
- 005 Ditjen Perhubungan Udara
- 006 Ditjen Perkeretaapian
- 007 Badan Litbang
- 008 Badan Pengembangan SDM
- 009 Mahkamah Pelayaran
- 010 Atase Perhubungan
- 011 Pusat Data dan Informasi
- 012 Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi
- 013 Pusat Komunikasi Publik
- 014 KNKT

### 10 Pengadaan Barang Jasa

- 101 Sekretariat Jenderal
- 102 Inspektorat Jenderal
- 103 Ditjen Perhubungan Darat
- 104 Ditjen Perhubungan Laut
- 105 Ditjen Perhubungan Udara
- 106 Ditjen Perkeretaapian
- 107 Badan Litbang
- 108 Badan Pengembangan SDM
- 109 Mahkamah Pelayaran
- 110 Atase Perhubungan
- 111 Pusat Data dan Informasi
- 112 Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi
- 113 Pusat Komunikasi Publik
- 114 KNKT

### 20 Khusus

- 201 Sekretariat Jenderal
- 202 Inspektorat Jenderal
- 203 Ditjen Perhubungan Darat
- 204 Ditjen Perhubungan Laut
- 205 Ditjen Perhubungan Udara
- 206 Ditjen Perkeretaapian
- 207 Badan Litbang
- 208 Badan Pengembangan SDM
- 209 Mahkamah Pelayaran
- 210 Atase Perhubungan
- 211 Pusat Data dan Informasi
- 212 Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi
- 213 Pusat Komunikasi Publik
- 214 KNKT

### 30 Umum

- 301 Sekretariat Jenderal
- 302 Inspektorat Jenderal
- 303 Ditjen Perhubungan Darat
- 304 Ditjen Perhubungan Laut
- 305 Ditjen Perhubungan Udara
- 306 Ditjen Perkeretaapian
- 307 Badan Litbang
- 308 Badan Pengembangan SDM
- 309 Mahkamah Pelayaran
- 310 Atase Perhubungan
- 311 Pusat Data dan Informasi
- 312 Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi
- 313 BPK
- 314 BPKP
- 315 Bawasda
- 316 Pengawasan melekat
- 317 Pengaduan masyarakat
- 318 Instansi/Badan/Unit Lain
- 319 Pusat Komunikasi Publik
- 320 Komite Nasional Keselamatan Transportasi

## **SM PENGEMBANGAN SDM**

### 00 Bina Perencanaan

- 001 Pengembangan SDM Transportasi Darat
- 002 Pengembangan SDM Transportasi Laut
- 003 Pengembangan SDM Transportasi Udara
- 004 Pengembangan SDM Perkeretaapian
- 005 Pengembangan SDM Badan SAR Nasional
- 006 Pengembangan SDM Aparatur
- 007 Pengembangan SDM Umum

### 10 Diklat Dalam Negeri

- 101 Diklat Lemhanas
- 102 Diklatpim Tk. I
- 103 Diklatpim Tk. II
- 104 Diklatpim Tk. III
- 105 Diklatpim Tk. IV
- 106 Penataran/Training, Penyuluhan, PKL
- 107 Kursus
- 108 Diklat Umum, Beasiswa, Pascasarjana
- 109 Seminar, Lokakarya, Kongres, Konferensi
- 110 Orientasi/Prajabatan
- 111 Diklat Awal

### 20 Diklat Luar Negeri

- 201 Diklat Transportasi Darat
- 202 Diklat Transportasi Laut

- 203 Diklat Transportasi Udara
- 204 Diklat Perkeretaapian
- 205 Diklat Badan SAR Nasional
- 206 Diklat Umum, Beasiswa, Pascasarjana
- 207 Seminar, Lokakarya, Kongres, Konferensi

30 Umum

- 301 Laporan dan Evaluasi Pendidikan
- 302 Wisuda
- 303 Widyaiswara/Dosen/Tenaga Pengajar/Instruktur

40 Standardisasi

- 401 Standar Pendidikan
- 402 Standar Pelatihan

**LT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

00 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Nasional

- 001 Manajemen Transportasi Multimoda
- 002 Transportasi Darat
- 003 Transportasi Laut
- 004 Transportasi Udara
- 005 Transportasi Perkeretaapian

10 Penyusunan rencana Penelitian dan Program Kerja

- 101 Manajemen Transportasi Multimoda
- 102 Transportasi Darat
- 103 Transportasi Laut
- 104 Transportasi Udara
- 105 Transportasi Perkeretaapian
- 106 Studi/Kajian, Riset/Survey Sistranas/Tatrawil/Tatralok

20 Laporan dan Dokumentasi

- 201 Laporan dan Evaluasi
- 202 Dokumentasi dan Perpustakaan
- 203 Statistik dan Visualisasi
- 204 Hasil Studi/Penelitian/Kajian, Paparan

30 Pembinaan Tenaga Fungsional

- 301 Kursus Peneliti
- 302 Pendidikan Bergelar
- 303 Ketrampilan Komputer

40 Penerapan Sarana dan Prasarana Transportasi

- 401 Manajemen Transportasi Multimoda
- 402 Transportasi Darat
- 403 Transportasi Laut



- 404 Transportasi Udara
- 405 Transportasi Perkeretaapian
- 406 Standardisasi

50 Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 501 Manajemen Transportasi Multimoda
- 502 Transportasi Darat
- 503 Transportasi Laut
- 504 Transportasi Udara
- 505 Transportasi Perkeretaapian
- 506 Badan-Badan, Dinas Transportasi
- 507 Umum/Kerjasama Penelitian
- 508 Amdal
- 509 Pudalsis

**KK KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI**

00 Kajian Kebijakan Investasi

- 001 Transportasi Darat
- 002 Transportasi Laut
- 003 Transportasi Udara
- 004 Transportasi Perkeretaapian
- 005 Umum

10 Penyusunan Rencana dan Program Kerja Kajian

- 101 Transportasi Darat
- 102 Transportasi Laut
- 103 Transportasi Udara
- 104 Transportasi Perkeretaapian
- 105 Umum

20 Pengumpulan Data Kinerja Pelayanan

- 201 Transportasi Darat
- 202 Transportasi Laut
- 203 Transportasi Udara
- 204 Transportasi Perkeretaapian
- 205 Penunjang

30 Evaluasi dan Laporan Kinerja Pelayanan

- 301 Transportasi Darat
- 302 Transportasi Laut
- 303 Transportasi Udara
- 304 Transportasi Perkeretaapian
- 305 Penunjang

- 40 Lingkungan Hidup
  - 401 Transportasi Darat
  - 402 Transportasi Laut
  - 403 Transportasi Udara
  - 404 Transportasi Perkeretaapian
  - 405 Penunjang

## **DI DATA DAN INFORMASI**

- 00 Pengembangan Sistem Informasi
  - 001 Perangkat Lunak
  - 002 Perangkat Keras
- 10 Pelayanan Informasi
  - 101 Penyajian Informasi
  - 102 Laporan dan Dokumentasi

## **2. KLASIFIKASI SUBSTANTIF**

### **AJ ANGKUTAN JALAN**

- 00 Pembinaan Fasilitas
  - 001 Kebutuhan Fasilitas
  - 002 Rehabilitasi/Perawatan
  - 003 Perizinan/Rekomendasi/Dispensasi/Registrasi/Kartu Pengawasan/Status
  - 004 Bina Usaha/KSO/Kinerja/Pemberitahuan/Teguran
  - 005 Pelayanan/Laporan/Operasi
  - 006 Bahan Bakar/Harga BBM
- 10 Terminal
  - 101 Tanah/Lokasi
  - 102 Bangunan/Gedung/Desain
  - 103 Perlengkapan
  - 104 Status/Jenis
  - 105 Retribusi
  - 106 Terminal Umum/Peralatan/Parkir
  - 107 Terminal Khusus/Haji
  - 108 Jembatan Timbang/Uji Petik
- 20 Angkutan Penumpang
  - 201 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru/Masa Liburan
  - 202 Turis/Pariwisata/Sewa/Khusus/Pelajar/TKI
  - 203 Transmigrasi
  - 204 Perintis/Antar Jemput
  - 205 Antar Kota/Propinsi
  - 206 Kota/Pedesaan/Motor/Sepeda Listrik/Roda Tiga/Pemukiman/Taxi

- 207 Lintas Batas
- 208 Angkutan Massal
- 209 Multimedia

### 30 Angkutan Barang

- 301 Pos
- 302 Minyak/BBM/Batu Bara/Gas
- 303 Log
- 304 Ternak
- 305 Sembilan Bahan Pokok
- 306 Peti Kemas
- 307 Muatan Umum/Tronton/Alat Berat
- 308 Lintas Batas
- 309 Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun

### 40 Keselamatan

- 401 Rambu-Rambu/Jaringan/Jalur/Halte/Aturan LL
- 402 Kelaikan Kendaraan/Kir/Pengoperasian/Merk/Buku Uji/Uji Tipe
- 403 Fasilitas Keselamatan
- 404 Tertib Lalu Lintas/Patroli/Pengawalan/Pengawasan/Penyidikan
- 405 Pemilikan (BPKB, STNK/Nomor Kendaraan)
- 406 Awak Kendaraan/Kualitas Pengemudi/AKUT
- 407 Surat Izin Mengemudi (SIM)
- 408 Jembatan Penyeberangan
- 409 Jalan dan Kelas Jalan
- 410 Rancang Bangun/Perakitan

### 50 Kecelakaan/Gangguan

- 501 Kecelakaan Penumpang
- 502 Kecelakaan Barang
- 503 Gangguan Sarana/Prasarana
- 504 Pembajakan
- 505 Pencemaran

### 60 Sarana/Perawatan/Perbaikan

- 601 Balai/Bengkel/Pool
- 602 Suku Cadang/Chassis/Peralatan

### 70 Pengembangan Industri dan Teknologi

- 701 Sarana Kendaraan
- 702 Prasarana

### 80 Umum

- 801 Asuransi/luran Wajib/Distribusi
- 802 Asosiasi
- 803 Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
- 804 Rally/Lomba/Pemilihan
- 805 Pejalan Kaki

## **KA PERKERETAAPIAN**

### 00 Pembinaan

- 001 Kebutuhan Fasilitas
- 002 Rehabilitasi/Perawatan
- 003 Perizinan
- 004 Bina Usaha/KSO
- 005 Pelayanan/Pengoperasian
- 006 Bahan Bakar
- 007 Teguran/Sanksi/Denda

### 10 Stasiun

- 101 Tanah/Lokasi
- 102 Bangunan/Gedung/Desain
- 103 Perlengkapan
- 104 Status/Jenis
- 105 Retribusi
- 106 Pelataran/Peron/Parkir
- 107 Stasiun Khusus

### 20 Angkutan Penumpang

- 201 Lebaran/Natal/Tahun Baru
- 202 Turis/Pariwisata/Kereta Luar Biasa
- 203 Transmigrasi
- 204 Perintis
- 205 Antar Kota
- 206 Kota
- 207 Kereta Listrik/Kereta Diesel
- 208 Angkutan Massal

### 30 Angkutan Barang

- 301 Pos
- 302 Minyak/BBM
- 303 Log
- 304 Ternak
- 305 Sembilan Bahan Pokok
- 306 Peti Kemas
- 307 Muatan Umum
- 308 Angkutan Barang Berbahaya
- 309 Angkutan Batubara

### 40 Keselamatan

- 401 Rambu-rambu/Lintasan/Jaringan/Jembatan
- 402 Kelaikan Kereta Api/Perakitan
- 403 Fasilitas Keselamatan
- 404 Sinyal/Telekomunikasi/Listrik
- 405 Sertifikasi/Akreditasi
- 406 Awak Kereta Api
- 407 Kecepatan/Grafik Perjalanan Kereta Api

50 Kecelakaan/Gangguan

- 501 Kecelakaan Penumpang
- 502 Kecelakaan Barang
- 503 Gangguan Sarana
- 504 Gangguan Prasarana
- 505 Pembajakan

60 Fasilitas Sarana/Perawatan/Perbaikan

- 601 Balai Yasa/Depo
- 602 Suku Cadang
- 603 Persyaratan Teknis/Pengujian Material
- 604 Jalan Baja/Rel/Jalur Ganda/Bantalan
- 605 Pengujian Pertama/Berkala
- 606 Sinyal/Telekomunikasi/Listrik

70 Umum

- 701 Asuransi
- 702 Asosiasi
- 703 Industri

**AP ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

00 Pembinaan Fasilitas

- 001 Kebutuhan Fasilitas
- 002 Rehabilitasi/Perawatan
- 003 Perizinan/Rekomendasi
- 004 Bina Usaha/KSO/Kinerja
- 005 Pelayanan/Laporan
- 006 Bahan Bakar

10 Terminal/Dermaga

- 101 Tanah/Lokasi
- 102 Bangunan/Gedung/Desain/Pembangunan Kapal
- 103 Perlengkapan
- 104 Status/Jenis
- 105 Retribusi
- 106 Dermaga/Pelabuhan
- 107 Dermaga Khusus

20 Angkutan Penumpang

- 201 Lebaran/Natal/Tahun Baru/Liburan Sekolah
- 202 Turis/Pariwisata
- 203 Transmigrasi
- 204 Antar Pulau/Perintis
- 205 Antar Desa

### 30 Angkutan Barang

- 301 Pos
- 302 Minyak
- 303 Log/Batu Bara/Bunker/Alat Berat
- 304 Ternak
- 305 Sembilan Bahan Pokok
- 306 Muatan Umum
- 307 Angkutan Khusus/Berbahaya

### 40 Keselamatan

- 401 Rambu-Rambu/Navigasi
- 402 Kelaikan Kapal/Uji Coba
- 403 Fasilitas Keselamatan/Cuaca
- 404 Reparasi Dok/Persyaratan Teknis/Pemeriksaan
- 405 Sertifikasi/Pemilikan/STK/Registrasi>Nama Kapal/Warna/Status
- 406 Awak Kapal
- 407 Buku Pelaut
- 408 Pergantian Bendera

### 50 Kecelakaan/Gangguan

- 501 Kecelakaan Penumpang
- 502 Kecelakaan Barang
- 503 Gangguan sarana/Prasarana/Kerusakan/Kandas
- 504 Pembajakan
- 505 Pencemaran

### 60 Sarana Perawatan/Perbaikan

- 601 Armada Pengerukan
- 602 Suku Cadang
- 603 Pengerukan Dermaga/Kolam Pelabuhan
- 604 Pengerukan Alur Sungai/Alur Pelayaran

### 70 Umum

- 701 Asuransi/Tiket/Kontribusi/Pungutan
- 702 Asosiasi
- 703 Rally Sungai/Lomba

## **AL ANGKUTAN LAUT**

### 00 Pembinaan Fasilitas

- 001 Kebutuhan Fasilitas
- 002 Rehabilitasi
- 003 Perizinan
- 004 Bina Usaha/KSO
- 005 Pelayanan
- 006 Bahan Bakar

## 10 Terminal/Kepelabuhan

- 101 Tanah/Lokasi
- 102 Bangunan/Gedung/Instalasi
- 103 Perlengkapan
- 104 Status/Jenis
- 105 Retribusi/Pas Pelabuhan
- 106 Pelabuhan Dermaga/Peta Pelabuhan
- 107 Pelabuhan Khusus/Dermaga

## 20 Angkutan Penumpang

- 201 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru
- 202 Turis/Pariwisata
- 203 Transmigrasi
- 204 Penumpang Dalam Negeri/Perintis/Pelra
- 205 Penumpang Luar Negeri
- 206 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

## 30 Angkutan Barang

- 301 Minyak dan Gas Bumi
- 302 Barang Umum (*General Cargo*)
- 303 Batu Bara
- 304 Kayu dan Olahan Primer
- 305 Sembilan Bahan Pokok
- 306 Minyak Sawit
- 307 Pupuk
- 308 Semen
- 309 Bahan Galian Tambang
- 310 Biji-Bijian Lainnya
- 311 Materi Cair dan Bahan Kimia Lainnya
- 312 Biji-bijian Hasil Pertanian
- 313 Sayur, Buah-Buahan, Ikan Segar
- 314 Pos
- 315 Peti Kemas
- 316 Angkutan Barang Berbahaya
- 317 Barang Dalam Negeri (Umum/Total)
- 318 Barang Luar Negeri (Umum/Total)
- 319 Barang Khusus

## 40 Industri dan Armada Pelayaran Nasional

- 401 Perusahaan Nasional Angkutan Laut (SIUPAL)
- 402 Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)
- 403 Perusahaan Pelayaran Rakyat
- 404 Armada Nasional
- 405 Bina Usaha Pelayaran Nasional
- 406 Usaha Penunjang Angkutan Laut
- 407 TKBM
- 408 Armada Pengerukan

## 50 Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

- 501 Rambu-Rambu/Mercusuar
- 502 Kelaikan Kapal
- 503 Fasilitas Keselamatan/Keamanan/Cuaca
- 504 Telekomunikasi Pelayaran
- 505 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal/Registrasi Kapal/Manifes Kapal
- 506 Awak Kapal
- 507 STCW
- 508 Buku Pelaut
- 509 Penggantian Bendera
- 510 Kepanduan/Kapal Pandu
- 511 Penjagaan Pantai dan Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
- 512 Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Kapal

## 60 Kecelakaan/Gangguan

- 601 Kecelakaan Penumpang/Kapal
- 602 Kecelakaan Barang
- 603 Gangguan Sarana/Prasarana
- 604 Pembajakan/Penyelundupan
- 605 Pencemaran
- 606 Pemberkasan Kecelakaan Kapal

## 70 Sarana Perawatan/Perbaikan

- 701 Suku Cadang
- 702 Pengerukan Kolam Pelabuhan
- 703 Pengerukan Alur Pelayaran
- 704 Reklamasi Pantai
- 705 Pekerjaan Bawah Air (*Salvage*)
- 706 Pembuatan Kapal

## 80 Umum

- 801 Asuransi
- 802 Asosiasi
- 803 Rally Perahu Layar

## **AU ANGKUTAN UDARA**

### 00 Angkutan Udara

- 001 Angkutan Penumpang
- 002 Angkutan Barang
- 003 Data Bandar Udara
- 004 Sistem Rute & Jaringan
- 005 Tarif Angkutan Penumpang
- 006 Pelayanan Jasa
- 007 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru
- 008 Lintas Batas



## 10 Bandar Udara

- 101 Pengembangan Bandara
- 102 Penetapan Lokasi
- 103 Rencana Induk/Master Plan
- 104 Pembangunan antar Moda dan Lintas Sektoral
- 105 KKOP/BKK/DLKR dan Eco Airport
- 106 Prasarana Bangunan
- 107 Prasarana Pergerakan Pesawat Udara
- 108 Sertifikasi Teknisi, Inspektur dan SOB
- 109 Kerjasama dan Perijinan Penyelenggaraan Bandara
- 110 Tarif Pelayanan Jasa

## 20 Keamanan Penerbangan

- 201 Pengamanan Bandar Udara
- 202 Pengamanan Operator Pesawat Udara
- 203 Personil PKP-PK dan *Salvage*
- 204 Teknis Pelayanan Darurat Penerbangan
- 205 Sertifikasi Personil Keamanan

## 30 Navigasi Penerbangan

- 301 Lalu Lintas Penerbangan/ATFM
- 302 *Air Traffic Services* (ATS)
- 303 Kartografi Penerbangan (Data Aeronautika, Peta Penerbangan)
- 304 Publikasi Informasi Aeronautika (AIP, Notam, AIC, Informasi Meteorologi Penerbangan)
- 305 Frekuensi Radio Penerbangan
- 306 Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan
- 307 Fasilitas Pengamatan Penerbangan

## 40 Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

- 401 Kecelakaan/Insiden Pesawat
- 402 Peringatan, Pembekuan, Pencabutan Sertifikat
- 403 Pelanggaran Bidang Uji Terbang
- 404 Uji Terbang Kemampuan Pesawat Udara
- 405 Perawatan Pesawat Udara
- 406 Sertifikasi/Pemilikan/Registrasi Pesawat Udara
- 407 Kelaikan Pesawat/Perakitan/Kalibrasi

## 50 Umum

- 501 Asuransi
- 502 Asosiasi
- 503 Satuan Pengamanan
- 504 Rally Udara/Lomba

## **MP MAHKAMAH PELAYARAN**

### 00 Bahan Pemeriksaan

- 001 Pengaduan, Penyampaian/Penerimaan/Pengembalian Berkas
- 002 Permintaan Data dan Bahan (Kapal dan Cuaca)

10 Pemeriksaan Perkara

- 101 Panggilan Sidang (Awak Kapal, Saksi dan Saksi Ahli)
- 102 Komisi (Sidang Komisi, Peninjauan TKP)
- 103 Penetapan Majelis/Penggantian Majelis
- 104 Dengar Pendapat/*Hearing*
- 105 Pemberitahuan, Pembacaan Putusan

20 Keputusan

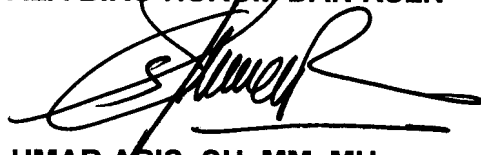
- 201 Penyampaian Putusan
- 202 Evaluasi dan Temuan
- 203 Laporan Pemeriksaan Lanjutan/Memo, Gugatan/Protes
- 204 Informasi, Pemberitahuan Tentang Kecelakaan Kapal

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001